

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR INSIDENTAL
DI KABUPATEN SIDOARJO
(Studi Kasus di GOR Gelora Delta Sidoarjo)

SKRIPSI



Oleh :

YORDAN BOY YULDAHARIES
NPM. 0541010047

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2011

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Parkir Insidental di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di GOR Gelora Delta Sidoarjo)”.

Laporan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Susi Hardjati, M.AP sebagai Dosen Pembimbing. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan sehingga penyusunan laporan proposal ini diantaranya :

1. Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. DR. Lukman Arif, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra Susi Hardjati, M.AP, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Drs. Abu Dardak, S.sos Selaku Kasi Bidang UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Bapak Jaelani Selaku Staf Bidang UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
7. Bapak Prawoto Selaku Staf Bidang UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
8. Kedua Orang tua, serta Kakak dan Adikku yang selalu memberikan do’a dan motivasi.
9. Buat COMPAX and GEPUK Lover’s dan untuk sahabat serta teman-teman Progdil Ilmu Administrasi Negara ’05 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga dengan laporan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umumnya serta para pembaca.

Surabaya, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Kebijakan Publik.....	11
2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	13
2.2.1.3 Sifat Kebijakan Publik.....	14
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.2.2.1 Pengertian Implementasi	15
2.2.2.2 Model Implementasi Kebijakan	16
2.2.2.3 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	18
2.2.2.4 Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan.....	19

2.2.2.5 Prospek Untuk Memperbaiki Implementasi Kebijakan	20
2.2.2.6 Aktor-aktor Yang Berperan Dalam Proses Kebijakan	22
2.2.2.7 Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan	24
2.2.3 Konsep Retribusi Parkir	25
2.2.4 Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Analisis Data	38
3.7 Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	44
4.1.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	44
4.1.1.1 Perkembangan Kelembagaan Secara Historis	45
4.1.1.2 Sektor/Sub Sektor.....	46
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.....	47
4.1.2.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	47
4.1.2.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	47

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	47
4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	51
4.1.4.1 Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	51
4.1.4.2 Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	51
4.1.5 Tugas UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	52
4.1.6 Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	52
4.1.7 Gambaran Umum GOR Gelora Delta Sidoarjo	55
4.1.8 Parkir Insidental Kabupaten Sidoarjo	56
4.1.9 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Parkir Insidental Di Kabupaten Sidoarjo	58
4.1.9.1 Dasar Hukum	58
4.2 Hasil Penelitian	58
4.2.1 Fasilitas Parkir	58
4.2.2 Pemungutan Retribusi Parkir	70
4.3 Pembahasan	77
4.3.1 Fasilitas Parkir	77
4.3.2 Pemungutan Retribusi Parkir	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	17
Gambar 2. Kerangka Berpikir	29
Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif	40
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	50

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 4.4 Daftar Tarif Retribusi Parkir Insidental.....	57
Tabel 4.5 Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir	57

ABSTRAKSI

YORDAN BOY YULDAHARIES, 0541010047, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR INSIDENTAL DI KABUPATEN SIDOARJO (STUDI KASUS DI GOR GELORA DELTA SIDOARJO), SKRIPSI, 2011.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, beberapa petugas juru parkir di GOR Gelora Delta Sidoarjo dan masyarakat pengguna jasa layanan parkir insidental.

Dari hasil temuan penelitian dikemukakan bahwa : implementasi kebijakan parkir insidental dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal implementasi kebijakan parkir insidental di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir insidental, dalam hal pengelolaannya retribusi parkir insidental dikelola oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya kebijakan parkir insidental belum terimplementasi secara optimal. Hal tersebut terlihat dari pemberian fasilitas parkir yang ada masih kurang memadai, dimana fasilitas parkir tersebut hanya sebatas penunjang kegiatan parkir insidental yang sifatnya sangat sederhana. Sementara pada penerapan pemungutan retribusi parkir juga belum terimplementasi secara optimal, karena masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh petugas dilapangan dalam hal pemberian tanda bukti pembayaran (karcis) yaitu dengan menjadikan karcis yang semestinya ditempel pada kendaraan tapi karcis tersebut diberikan kepada pengguna jasa parkir lainnya. Kedua masalah diatas disebabkan karena dalam aturan yang ada masih bersifat secara umum, bukan secara khusus yang mengatur lebih jelas dan rinci tentang peraturan dan prosedur parkir insidental.

Berdasarkan temuan peneliti diatas disarankan : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hendaknya memperhatikan lebih jauh dan membuat aturan pelaksana dengan jelas dan rinci tentang parkir insidental agar kebijakan parkir insidental dapat terimplementasi secara optimal. Serta Perlunya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada para juru parkir dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir insidental di GOR Gelora Delta Sidoarjo sebagai upaya untuk memperkecil kesalahan yang terjadi di lapangan, karena pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan parkir insidental.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya perwujudan good governance, maka dilakukan perubahan terhadap tata pemerintahan di Indonesia. Dimana pola pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah yang semula bersifat sentralistik telah diubah dalam suatu pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah lokal maka dibutuhkan sikap dan semangat entrepreneurship dalam birokrasi. Jiwa entrepreneurship adalah jiwa dimana individu kelompok dalam organisasi dapat mengelola sumber-sumber yang berupa kesempatan dan tantangan menjadi hasil yang nyata. Jiwa-jiwa ini yang dapat mengantarkan individu ke dalam pengambilan peran dalam berkarya dan mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki ke dalam proses produktif. Sejalan dengan studi Osborne dan Gaebler (1995) yang merekomendasikan bahwa pemerintah di era yang akan datang dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara yang efisien sekaligus memerlukan public

servant yang memiliki jiwa entrepreneur, bukan hanya menghabiskan anggaran fiskal yang ada.

Hal tersebut menyiratkan bahwa peran penting pemerintah lokal dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mewakili semua pihak dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, maka diharapkan adanya kondisi yang sehat bagi perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, social, maupun dimensi lainnya.

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. Dalam perkembangannya, salah satu sumber yang cukup signifikan dalam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD, sekaligus sebagai bentuk cermin pelayanan publik yang diberikan pemerintah lokal terhadap masyarakat adalah kebijakan retribusi parkir. Pengelolaan perparkiran yang efektif dan efisien

merupakan harapan dari masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah lokal juga bisa menggali pendanaan secara maksimal dan memenuhi aspirasi masyarakat lokal yang ada.

Menurut Friedrich dalam Winarno (2007:17), dikatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan - hambatan dan peluang - peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Kebijakan parkir juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan mempermudah para pengguna jasa parkir dalam setiap parkir kendaraan. Sehubungan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo maka dibuatkan aturan yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemakai jasa parkir secara maksimal yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir. Dalam pelaksanaan dilapangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir juga didukung dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai petunjuk teknis.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 di jelaskan bahwa kebijakan parkir yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan penyediaan tempat parkir, meliputi : 1). Parkir di tepi jalan umum, 2). Parkir di tempat khusus parkir, 3). Parkir Insidental.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Pasal 1 Poin 22 disebutkan, parkir insidental adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir ditempat parkir insidental. Tempat parkir insidental adalah penyediaan layanan parkir pada suatu areal tertentu bersifat sementara karena adanya kegiatan/event khusus yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas.

Salah satu kegiatan/event yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas adalah pertandingan sepak bola. Penampilan Timnas yang tampil gemilang pada perhelatan Piala AFF beberapa bulan yang lalu turut memberikan andil dalam meningkatnya animo masyarakat Gelora Delta Sidoarjo yang selalu dipenuhi oleh supporter, khususnya supporter tuan rumah saat menyaksikan secara langsung pertandingan klub Deltras (klub kebanggaan masyarakat Sidoarjo) dalam perhelatan Liga ISL di GOR Gelora Delta. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap pemasukan keuangan daerah khususnya lewat jalur retribusi parkir insidental. Selain perhelatan Liga ISL stadion Gelora Delta Sidoarjo juga sering digunakan untuk acara – acara hiburan seperti konser musik dan event-event lainnya. Seperti event musik yang diadakan oleh SCTV beberapa waktu yang lalu. Kehadiran pentas musik ini, tidak hanya memuaskan pecinta musik dalam negeri. Pedagang kaki lima pun turut menikmati keuntungan yang cukup besar. Bahkan beberapa pengelola jasa parkir mengaku meraup keuntungan yang lebih besar ketimbang pertandingan sepakbola yang rutin digelar. Dalam situasi seperti ini parkir sepeda motor senilai Rp 5000 /sepeda. Sedangkan parkir mobil

bervariasi tergantung pemiliknya, adakalanya Rp 5000 tapi tidak sedikit yang membayar lebih dari itu.

(<http://citizen6.liputan6.com/read/325261/karnaval%20SCTV>, Minggu, 20 Maret 2011).

Dalam hal ini pemberlakuan tarif parkir yang ditetapkan pada acara tersebut tidak berdasarkan ketentuan tarif parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Tarif parkir insidental untuk jenis kendaraan roda dua berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 ditetapkan tarif sebesar Rp1000, namun dalam kenyataannya untuk jenis kendaraan roda dua dikenakan tarif sebesar Rp5000 pada acara tersebut.

Hal tersebut tanpa disadari telah merugikan masyarakat pengguna jasa parkir insidental. Pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir pada acara ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berkompetensi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir insidental, sehingga para juru parkir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Melihat fenomena dan permasalahan diatas dalam penerapan retribusi parkir insidental, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan parkir insidental yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Insidental Di Kabupaten Sidoarjo (Studi kasus di GOR Gelora Delta Sidoarjo)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengangkat permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana implementasi kebijakan parkir insidental di GOR Gelora Delta Kabupaten Sidoarjo?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir insidental di Kabupaten Sidoarjo khususnya di GOR Gelora Delta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis untuk menelaah secara mendalam tentang sistem dan pelaksanaan penarikan retribusi parkir insidental di Kabupaten Sidoarjo, dan hal ini sangat berguna bila kelak terjun ke masyarakat.

2. Bagi Instansi

Memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan parkir insidental di Kabupaten Sidoarjo serta sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak yang berkompetensi dalam pelaksanaan parkir insidental.

3. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada khususnya.